
ARTIKEL

Analisis Tata Kelola Wilayah Pesisir dalam Perspektif Integrated Coastal Management: Peran Collaborative Governance di Desa Sukajaya Lempasing

Anisa Utami^{1*} Aldiva Mukhsin² Muhammad Fauzi Mufti³ Azzahra Risqi Andania⁴
Ani Agus Puspawati⁵

¹²³⁴⁵Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Jl.Prof Dr. Ir. Sumantri Bojonegoro No. 1, Bandar Lampung, Indonesia

How to cite: Anisa Utami, Aldiva Mukhsin, Muhammad Fauzi Mufti, Azzahra Risqi Andania, Ani Agus Puspawati (2026) Analisis Tata Kelola Wilayah Pesisir dalam Perspektif Integrated Coastal Management: Peran Collaborative Governance di Desa Sukajaya Lempasing

Article History

Received: 15 April 2026

Accepted: 14 Mei 2026

Keywords:

Keywords contain three to five separate words / phrases. Press the enter key after each keyword.

Kata Kunci:

Tata Kelola Wilayah Pesisir; Integrated Coastal Management; Collaborative Governance

ABSTRACT

The coastal area of Sukajaya Lempasing Village in Lampung Province faces environmental pressures such as marine debris accumulation and increasing use of coastal space, while at the same time serving as a livelihood base for local communities through fisheries and coastal tourism. This study aims to analyse coastal area management and governance in the village using the Integrated Coastal Management (ICM) approach, which integrates ecological, socio-economic, institutional, and stakeholder participation dimensions. A qualitative descriptive approach was employed through field observation, in-depth interviews with village government officials, fishers, tourism business actors, and community leaders, as well as analysis of relevant policy documents. Data were analysed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, comprising data reduction, data display, and conclusion drawing, supported by source and technique triangulation to ensure credibility. The findings show that Sukajaya Lempasing Village has several basic conditions that support ICM implementation, including village regulations related to coastal areas, deliberative decision-making mechanisms, relatively preserved ecological conditions, and a multisector livelihood structure. However, coastal management still faces challenges such as regulations that are not yet comprehensive, community participation that is not institutionalised on a continuous basis, limited structured ecosystem-based conservation programmes, and suboptimal cross-sectoral and cross-level coordination. The study concludes that strengthening regulatory frameworks, stakeholder participation, conservation efforts, and coordination mechanisms is crucial to achieving more integrated and sustainable coastal management in Sukajaya Lempasing Village.

Keywords: Coastal Governance; Integrated Coastal Management; Collaborative Governance

* Corresponding Author

Email : anisa.utami2008@fisip.unila.ac.id

ABSTRAK

Wilayah pesisir Desa Sukajaya Lempasing di Provinsi Lampung menghadapi tekanan lingkungan berupa akumulasi sampah laut dan peningkatan pemanfaatan ruang, sekaligus menjadi tumpuan mata pencaharian masyarakat dari sektor perikanan dan pariwisata. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan dan tata kelola wilayah pesisir desa tersebut dengan menggunakan pendekatan Integrated Coastal Management (ICM) yang mengintegrasikan dimensi ekologis, sosial-ekonomi, kelembagaan, dan partisipasi pemangku kepentingan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pemerintah desa, nelayan, pelaku usaha wisata, dan tokoh masyarakat, serta analisis dokumen kebijakan terkait. Data dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Sukajaya Lempasing memiliki beberapa modal dasar yang mendukung penerapan ICM, seperti adanya regulasi desa terkait pesisir, mekanisme musyawarah, kondisi ekologis yang relatif terjaga, dan struktur mata pencaharian multisektor. Namun, pengelolaan pesisir masih menghadapi tantangan berupa regulasi yang belum komprehensif, partisipasi masyarakat yang belum terlembaga secara berkelanjutan, program konservasi yang belum terstruktur, serta koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan yang belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan aspek regulasi, partisipasi, konservasi, dan koordinasi menjadi kunci untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir Desa Sukajaya Lempasing yang lebih terpadu dan berorientasi pada keberlanjutan.

Kata Kunci: Tata Kelola Wilayah Pesisir; *Integrated Coastal Management*; *Collaborative Governance*

1. PENDAHULUAN

Wilayah pesisir merupakan kawasan transisi yang menghubungkan ekosistem daratan dan laut sehingga menampung beragam aktivitas ekologis, sosial, dan ekonomi, seperti perikanan, pariwisata, permukiman, dan konservasi. Di banyak wilayah Indonesia, intensitas pemanfaatan ruang pesisir yang tinggi telah memicu degradasi lingkungan, konflik pemanfaatan ruang, serta penurunan kualitas ekosistem yang berdampak langsung terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sebagai negara kepulauan yang semakin terpapar dampak perubahan iklim, kenaikan muka air laut, abrasi, dan akumulasi sampah laut, Indonesia memerlukan pendekatan pengelolaan pesisir yang mampu menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya dan perlindungan lingkungan secara berkelanjutan.

Konsep Integrated Coastal Management (ICM) menawarkan kerangka untuk menjawab tantangan tersebut melalui integrasi kebijakan, koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan, serta pelibatan pemangku kepentingan secara bermakna. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, seperti tumpang tindih kewenangan, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan pendanaan, serta

pelibatan masyarakat yang belum merata, sehingga intervensi pengelolaan sering kali bersifat parsial dan sektoral. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian mengenai bagaimana prinsip-prinsip ICM diimplementasikan pada level lokal, khususnya di desa pesisir yang mengalami tekanan lingkungan sekaligus memiliki peluang ekonomi.

Desa Sukajaya Lempasing di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, merupakan salah satu contoh kawasan pesisir dengan karakteristik tersebut. Wilayah pesisir desa ini menjadi tumpuan aktivitas perikanan dan pariwisata pesisir yang berkembang pesat, namun sekaligus menghadapi permasalahan lingkungan seperti akumulasi sampah plastik yang terbawa dari wilayah hulu dan meningkatnya tekanan terhadap ekosistem pesisir. Berbagai penelitian terdahulu di desa ini lebih banyak menyoroti aspek lingkungan, dampak pariwisata, dan ketahanan pangan rumah tangga nelayan, tetapi belum secara khusus menganalisis pengelolaan dan tata kelola wilayah pesisir dalam kerangka Integrated Coastal Management.

Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis pengelolaan dan tata kelola wilayah pesisir di Desa Sukajaya Lempasing menggunakan perspektif Integrated Coastal Management (ICM). Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan kerangka kelembagaan dan regulasi pengelolaan pesisir di tingkat desa; (2) menilai kondisi ekologis dan sosial-ekonomi masyarakat pesisir; (3) mengkaji bentuk dan tingkat partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan pesisir; dan (4) mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan dalam pengelolaan wilayah pesisir desa. Melalui tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat pengelolaan wilayah pesisir Desa Sukajaya Lempasing secara lebih terpadu dan berkelanjutan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Wilayah pesisir merupakan kawasan transisi yang mempertemukan ekosistem daratan dan lautan sehingga memiliki karakteristik ekologis, sosial, dan ekonomi yang kompleks. Kawasan ini menjadi ruang bagi berbagai aktivitas, seperti perikanan, pariwisata, transportasi laut, konservasi, hingga permukiman. Tingginya intensitas pemanfaatan wilayah pesisir sering kali memicu degradasi lingkungan, konflik pemanfaatan ruang, pencemaran, serta penurunan kualitas ekosistem apabila tidak diimbangi dengan tata kelola yang terpadu. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah pesisir tidak lagi dapat dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan pendekatan yang mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan pembangunan dengan prinsip keberlanjutan. Konsep Integrated Coastal Management (ICM) hadir sebagai pendekatan yang menekankan integrasi kebijakan, koordinasi antarlembaga, partisipasi masyarakat, serta keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya pesisir. Studi mengenai implementasi ICM di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan ini menjadi instrumen penting dalam mengatasi fragmentasi kebijakan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan pesisir.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian oleh Adrian Nugraha mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam pengelolaan wilayah pesisir, implementasinya belum berjalan optimal karena masih ditemui tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan pendanaan, serta rendahnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan pesisir cenderung berjalan secara parsial sehingga

tujuan pembangunan pesisir yang berkelanjutan belum dapat dicapai secara maksimal. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan implementasi ICM di Indonesia.

Perkembangan konsep ICM juga menunjukkan adanya pergeseran menuju pendekatan yang lebih transdisipliner. Zamani dkk. menjelaskan bahwa kompleksitas permasalahan pesisir tidak lagi dapat diselesaikan hanya melalui integrasi antarinstansi pemerintah, tetapi juga memerlukan kolaborasi antara akademisi, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi nonpemerintah. Pendekatan tersebut bertujuan menciptakan tata kelola pesisir yang adaptif terhadap perubahan lingkungan sekaligus mampu mengakomodasi kepentingan sosial, ekonomi, dan konservasi secara seimbang. Dengan demikian, pengelolaan wilayah pesisir tidak hanya berorientasi pada perlindungan lingkungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat sebagai pengguna utama sumber daya pesisir.

Penerapan ICM juga terbukti memberikan kontribusi terhadap pengembangan kawasan wisata pesisir yang berkelanjutan. Penelitian Sulistyadi dkk. pada kawasan Ole Marine Park menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan wisata bahari dipengaruhi oleh integrasi antara perencanaan tata ruang, konservasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi kelembagaan. Melalui pendekatan tersebut, kawasan pesisir tidak hanya mampu meningkatkan nilai ekonomi masyarakat, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem yang menjadi daya tarik utama pariwisata. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip ICM dapat menjadi pedoman dalam menyusun strategi pengelolaan kawasan pesisir yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Penelitian lain mengenai strategi pengelolaan wilayah pesisir menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat lokal, konservasi ekosistem, serta sinergi antaraktor. Melalui pendekatan *systematic literature review*, Suhendri dkk. menyimpulkan bahwa strategi pengelolaan pesisir yang efektif harus mampu mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan secara bersamaan. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip ICM yang menempatkan partisipasi masyarakat dan kolaborasi lintas sektor sebagai fondasi utama dalam mewujudkan keberlanjutan wilayah pesisir.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, tantangan pengelolaan wilayah pesisir juga semakin kompleks akibat meningkatnya ancaman perubahan iklim, abrasi, kenaikan muka air laut, dan pencemaran. Penelitian Alwi dkk. mengenai pengelolaan pulau-pulau kecil di Karimunjawa menunjukkan bahwa penyusunan kebijakan pengelolaan pesisir perlu mempertimbangkan berbagai risiko lingkungan secara terpadu melalui pendekatan berbasis multi-bahaya (*multi-hazard assessment*). Integrasi informasi kerentanan ekologis dengan kondisi sosial masyarakat dinilai mampu menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap berbagai ancaman di wilayah pesisir.

Kondisi empiris di Desa Sukajaya Lempasing juga memperlihatkan pentingnya penerapan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Penelitian Putra dkk. menemukan bahwa wilayah pesisir Desa Sukajaya Lempasing mengalami akumulasi sampah laut yang didominasi oleh limbah plastik. Berdasarkan hasil pemodelan arus permukaan dan wawancara dengan masyarakat, sebagian besar sampah berasal dari aliran sungai yang kemudian terbawa arus sejajar pantai hingga terakumulasi di kawasan pesisir. Temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan di Desa Sukajaya Lempasing tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat lokal, tetapi juga berkaitan dengan dinamika wilayah hulu sehingga

membutuhkan koordinasi lintas wilayah dalam proses pengelolaannya. Selain persoalan sampah laut, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa kerentanan wilayah pesisir Indonesia dipengaruhi oleh degradasi ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang. Penurunan kualitas ekosistem tersebut berdampak pada meningkatnya risiko abrasi, berkurangnya keanekaragaman hayati, serta menurunnya produktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Oleh sebab itu, pengelolaan wilayah pesisir tidak cukup hanya berfokus pada pengendalian pencemaran, tetapi juga harus memperhatikan upaya konservasi ekosistem sebagai bagian dari strategi pembangunan pesisir berkelanjutan. Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu dapat disintesis bahwa keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir sangat dipengaruhi oleh empat aspek utama, yaitu keberlanjutan ekologi, kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat, efektivitas kelembagaan, dan partisipasi pemangku kepentingan. Keempat aspek tersebut saling berkaitan sehingga tidak dapat dipisahkan dalam proses pengambilan kebijakan. Pendekatan ICM menjadi salah satu konsep yang mampu mengintegrasikan seluruh dimensi tersebut melalui koordinasi lintas sektor, harmonisasi kebijakan, serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pengelolaan wilayah pesisir.

Meskipun penelitian mengenai pengelolaan wilayah pesisir telah banyak dilakukan, masih terdapat *research gap* yang menjadi dasar penelitian ini. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek lingkungan seperti pencemaran, kerentanan pesisir, konservasi ekosistem, maupun pengembangan wisata bahari. Sementara itu, penelitian yang secara khusus menganalisis tata kelola pengelolaan wilayah pesisir di Desa Sukajaya Lempasing menggunakan perspektif Integrated Coastal Management (ICM) masih sangat terbatas. Padahal, Desa Sukajaya Lempasing merupakan kawasan pesisir yang mengalami tekanan lingkungan sekaligus memiliki potensi ekonomi dari sektor perikanan dan pariwisata. Kondisi tersebut menjadikan desa ini sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip ICM diimplementasikan dalam pengelolaan wilayah pesisir sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Berdasarkan *research gap* tersebut, penelitian ini menggunakan teori Integrated Coastal Management (ICM) sebagai landasan analisis. ICM merupakan pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang mengintegrasikan dimensi ekologis, sosial-ekonomi, kelembagaan, dan partisipasi pemangku kepentingan dalam satu kerangka pengelolaan yang berorientasi pada keberlanjutan. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan menganalisis pengelolaan dan tata kelola wilayah pesisir di Desa Sukajaya Lempasing untuk mengetahui sejauh mana implementasi prinsip-prinsip ICM telah diterapkan dalam mendukung pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis pengelolaan dan tata kelola wilayah pesisir di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi empiris pengelolaan wilayah pesisir, interaksi antar pemangku kepentingan, serta implementasi kebijakan dalam mewujudkan pengelolaan pesisir yang berkelanjutan. Pendekatan ini dinilai sesuai untuk mengkaji fenomena tata kelola yang melibatkan aspek ekologis, sosial, ekonomi, dan kelembagaan secara terpadu. Konsep tersebut sejalan dengan prinsip Integrated Coastal Management (ICM) yang menekankan integrasi antarsektor, koordinasi kelembagaan, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir.

Lokasi penelitian berada di Desa Sukajaya Lempasing, yang merupakan salah satu kawasan pesisir di Provinsi Lampung dengan aktivitas perikanan dan pariwisata yang berkembang pesat. Kawasan ini dipilih secara purposive karena memiliki karakteristik wilayah yang kompleks, ditandai dengan tingginya aktivitas pemanfaatan ruang pesisir serta berbagai permasalahan lingkungan, seperti akumulasi sampah laut, tekanan terhadap ekosistem pesisir, dan meningkatnya intensitas kegiatan wisata. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa wilayah pesisir Desa Sukajaya Lempasing mengalami dominasi sampah plastik yang sebagian besar berasal dari aliran sungai dan kemudian terakumulasi akibat dinamika arus sejajar pantai. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan pengelolaan yang terintegrasi dari aspek lingkungan, kelembagaan, hingga partisipasi masyarakat.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan wilayah pesisir. Informan penelitian meliputi aparatur Pemerintah Desa Sukajaya Lempasing, perangkat daerah yang membidangi kelautan dan lingkungan hidup, kelompok nelayan, pelaku usaha wisata, tokoh masyarakat, serta masyarakat pesisir. Adapun data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dokumen perencanaan, regulasi pemerintah, laporan instansi terkait, serta dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan mengelompokkan informasi yang relevan berdasarkan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi yang disusun berdasarkan dimensi-dimensi Integrated Coastal Management (ICM) sehingga memudahkan proses interpretasi. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan melalui proses verifikasi secara terus-menerus terhadap hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi hingga diperoleh temuan yang kredibel. Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan serta berbagai metode pengumpulan data.

Analisis penelitian menggunakan teori Integrated Coastal Management (ICM) sebagai kerangka analisis utama. Mengacu pada perkembangan konsep ICM dalam berbagai penelitian mutakhir, analisis difokuskan pada empat dimensi, yaitu dimensi ekologis, dimensi sosial-ekonomi, dimensi kelembagaan dan tata kelola, serta dimensi partisipasi pemangku kepentingan. Keempat dimensi tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana pengelolaan wilayah pesisir di Desa Sukajaya Lempasing telah mengintegrasikan aspek pelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat, efektivitas kelembagaan, dan kolaborasi antaraktor dalam mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak Pemerintah Desa Sukajaya Lempasing beserta narasumber masyarakat setempat, yang mencakup dua aspek utama, yaitu aspek kelembagaan dan kebijakan pengelolaan pesisir, serta aspek kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Kedua aspek tersebut kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori Integrated Coastal Management (ICM) atau Pengelolaan Wilayah

Pesisir Terpadu. Cicin-Sain dan Knecht (1998) menjelaskan bahwa ICM pada dasarnya bertujuan menyatukan kebijakan, kelembagaan, dan instrumen hukum agar pemanfaatan sumber daya pesisir dapat berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan menekankan empat bentuk keterpaduan, yaitu keterpaduan wilayah/ekologis, keterpaduan sektor, keterpaduan disiplin ilmu, dan keterpaduan pemangku kepentingan. Pembahasan berikut disusun mengikuti dimensi-dimensi tersebut, yaitu kelembagaan dan kebijakan, partisipasi pemangku kepentingan, kondisi ekologis, kondisi sosial-ekonomi, serta koordinasi dan integrasi lintas sektor.

4.2 Dimensi Kelembagaan dan Kebijakan Pengelolaan Pesisir

Salah satu prasyarat utama ICM adalah tersedianya kerangka hukum dan kelembagaan yang menjadi landasan bagi seluruh proses pengelolaan wilayah pesisir, mulai dari tahap penataan dan perencanaan, formulasi, implementasi, hingga evaluasi (Cicin-Sain & Knecht, 1998). Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Desa Sukajaya Lempasing telah memiliki peraturan desa yang berkaitan dengan perlindungan kawasan pesisir, yang disusun sebagai acuan dalam pengelolaan dan perlindungan wilayah tersebut. Selain regulasi di tingkat desa, pengelolaan pesisir juga merujuk pada kebijakan dan keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten, sehingga secara struktural telah terbentuk keterkaitan regulasi antara tingkat desa dan tingkat kabupaten. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Dahuri, Rais, Ginting, dan Sitepu (2001) bahwa pengelolaan sumber daya wilayah pesisir yang efektif memerlukan sinkronisasi kebijakan antar tingkatan pemerintahan agar tidak terjadi kekosongan maupun tumpang tindih pengaturan.

Meskipun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih bersifat umum dan belum sepenuhnya komprehensif. Desa memang telah memiliki aturan yang mengatur sektor pariwisata pesisir, namun belum tersedia peraturan khusus yang mengatur seluruh aspek pengelolaan kawasan pesisir secara lebih rinci, seperti zonasi pemanfaatan, mekanisme perizinan pengelolaan pantai oleh perorangan, maupun standar perlindungan ekosistem. Hal ini sejalan dengan temuan kajian tumpang tindih regulasi pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia, yang menunjukkan bahwa harmonisasi peraturan antartingkat pemerintahan masih menjadi kendala umum dalam implementasi kebijakan pesisir di daerah (Ramadhan et al., 2026). Kay dan Alder (1999) turut menegaskan bahwa pengelolaan pesisir yang efektif menuntut perencanaan lintas sektor yang komprehensif, bukan sekadar pengaturan pada satu bidang pemanfaatan tertentu, sehingga kesenjangan regulasi semacam ini merupakan tantangan umum dalam penerapan ICM di tingkat lokal.

4.3 Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Partisipasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam ICM, karena keberhasilan pengelolaan pesisir sangat bergantung pada keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan (Cicin-Sain & Knecht, 1998). Safrina (2020) dalam kajiannya terhadap pengelolaan wilayah pesisir di Aceh juga menekankan bahwa penguatan kapasitas institusi masyarakat dan pelibatan mereka sejak tahap perencanaan menjadi kunci keberlanjutan pengelolaan pesisir berbasis komunitas. Hasil wawancara pada penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan peraturan desa, pemerintah desa telah melibatkan masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui forum musyawarah sebelum peraturan ditetapkan, yang mengindikasikan adanya upaya penerapan prinsip partisipatif dalam tata kelola pesisir di tingkat desa.

Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam praktiknya masih bersifat kondisional, karena sangat bergantung pada kehadiran dan keterlibatan masing-masing warga dalam forum musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi yang terjadi belum sepenuhnya terlembagakan secara sistematis. Kajian literatur mengenai pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat lokal menyebutkan bahwa koordinasi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, kelompok masyarakat, dan sektor swasta, masih menjadi tantangan utama, sehingga diperlukan kerangka kerja yang jelas untuk mengatur peran dan tanggung jawab masing-masing pihak agar partisipasi berjalan berkelanjutan (Aptasari et al., 2024). Dari perspektif ICM, kondisi di Desa Sukajaya Lempasing menggambarkan bahwa mekanisme partisipasi sudah ada, tetapi keberlanjutannya perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih terstruktur, misalnya forum multipihak pesisir yang melibatkan nelayan, pengelola pantai, dan pelaku usaha secara berkala.

Fenomena lain yang relevan dengan partisipasi pemangku kepentingan adalah pengelolaan sejumlah kawasan pantai oleh pihak perorangan. Kendala yang muncul dalam pengelolaan tersebut umumnya berkaitan dengan batas kepemilikan atau batas pengelolaan antar individu, meskipun tidak ditemukan permasalahan terkait batas wilayah antar desa. Para pengelola pantai cenderung berkoordinasi langsung dengan dinas terkait di tingkat kabupaten, sehingga pemerintah desa tidak selalu memperoleh informasi rinci mengenai proses perizinan maupun aktivitas pengelolaan yang berlangsung di wilayahnya sendiri. Kondisi ini menggambarkan adanya celah informasi (information gap) antara aktor pengelola di lapangan dan pemerintah desa selaku otoritas lokal, sebagaimana juga diidentifikasi dalam kajian tentang lemahnya koordinasi antarlembaga sebagai salah satu faktor pemicu konflik pemanfaatan sumber daya pesisir (Wijaya, 2014).

4.4 Kondisi Ekologis Wilayah Pesisir

Dimensi ekologis merupakan salah satu fondasi utama ICM, mengingat keberlanjutan pengelolaan pesisir sangat ditentukan oleh daya dukung ekosistem yang ada (Cicin-Sain & Knecht, 1998). Hasil wawancara menunjukkan bahwa kondisi lingkungan pesisir Desa Sukajaya Lempasing saat ini masih relatif baik dan belum mengalami kerusakan yang signifikan. Ketersediaan ikan di perairan sekitar juga tidak menunjukkan penurunan yang berarti, sehingga aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan masih dapat berlangsung seperti biasa tanpa perubahan hasil tangkapan yang mencolok.

Dari sisi kebersihan lingkungan, jumlah sampah di kawasan laut tergolong relatif sedikit dan belum menjadi persoalan utama. Timbulan sampah yang cukup terlihat umumnya hanya muncul pada periode tertentu, terutama saat musim utara, ketika arus laut membawa material sampah dari wilayah lain menuju kawasan pesisir desa. Karena sifatnya musiman, kondisi tersebut tidak berlangsung sepanjang tahun dan belum memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat maupun ketersediaan sumber daya perikanan.

Meskipun kondisi ekologis tergolong masih terjaga, upaya konservasi yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat belum banyak ditemukan. Salah satu bentuk upaya pelestarian yang pernah dilaksanakan adalah program penanaman mangrove, yang bertujuan menjaga ekosistem pesisir dari ancaman abrasi dan kerusakan lingkungan. Pendekatan berbasis ekosistem semacam ini sejalan dengan prinsip pengelolaan sosial-ekologis yang dikemukakan Berkes dan Folke (1998), yang menekankan pentingnya menjaga keterkaitan antara sistem sosial masyarakat pesisir dan sistem ekologi tempat mereka bergantung agar ketahanan (resilience) kawasan pesisir dapat terjaga dalam jangka panjang. Akan tetapi, di luar kegiatan

penanaman mangrove tersebut belum terdapat program pemeliharaan lingkungan lain yang dilakukan secara berkelanjutan, sehingga kondisi lingkungan yang masih baik semestinya menjadi momentum strategis untuk membangun sistem konservasi yang lebih preventif dan terprogram, bukan reaktif terhadap kerusakan yang sudah terjadi.

4.5 Data Kependudukan dan Mata Pencarian Masyarakat

Untuk melengkapi gambaran kondisi sosial-ekonomi hasil wawancara, berikut disajikan data kependudukan dan mata pencarian Desa Sukajaya Lempasing yang bersumber dari profil desa dan beberapa penelitian terdahulu yang berlokasi di desa yang sama. Berdasarkan data Sistem Informasi Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, desa ini terdiri atas 8 (delapan) dusun dengan jumlah total 1.901 Kepala Keluarga (KK), yang terdiri atas 3.535 jiwa penduduk laki-laki dan 3.448 jiwa penduduk perempuan, sehingga total penduduk desa berkisar 6.983 jiwa, atau secara umum sering dibulatkan menjadi sekitar 7.000 jiwa (Pemerintah Desa Sukajaya Lempasing, 2023). Luas kawasan permukiman desa tercatat sebesar 650 hektare, dengan jarak tempuh ke ibu kota kecamatan sekitar 4 km dan ke ibu kota kabupaten sekitar 60 km.

Dari sisi mata pencarian, mayoritas penduduk Desa Sukajaya Lempasing bekerja pada sektor perikanan (nelayan), pertanian, dan perdagangan/usaha kecil, sejalan dengan karakteristik desa pesisir yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya laut dan lahan sekitarnya (Profil Desa Sukajaya Lempasing, 2021). Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara pada penelitian ini yang menunjukkan dominasi mata pencarian nelayan serta adanya usaha kecil masyarakat, khususnya perempuan, di sekitar kawasan pantai.

Data pendukung dari penelitian Wibowo, Kaskoyo, dan Damai (2019) mengenai dampak pariwisata Pantai Mutun terhadap masyarakat Desa Sukajaya Lempasing turut memberikan gambaran kuantitatif kondisi ekonomi masyarakat, yaitu tingkat penyerapan tenaga kerja masyarakat desa mencapai sekitar 85%, dengan pendapatan rata-rata masyarakat sekitar Rp815.000,00 per bulan. Perkembangan sektor pariwisata pesisir di desa ini juga tercatat turut mendorong terjadinya peralihan sebagian profesi masyarakat, dari yang semula bertumpu pada sektor perikanan tangkap menuju sektor jasa wisata, sekaligus membuka peluang kerja baru bagi penduduk setempat.

Sementara itu, dari sisi kerentanan sosial-ekonomi rumah tangga nelayan, penelitian Delly, Prasmatiwati, dan Prayitno (2020) yang secara khusus meneliti 51 rumah tangga nelayan di Desa Sukajaya Lempasing menemukan bahwa sebagian besar rumah tangga nelayan (68,63%) berada pada kategori kurang pangan, sedangkan sisanya tergolong tahan pangan (13,73%), rentan pangan (5,88%), dan rawan pangan (11,76%). Faktor yang memengaruhi tingkat ketahanan pangan tersebut antara lain tingkat pendidikan formal ibu rumah tangga dan besaran pengeluaran pangan rumah tangga. Data ini memberikan indikasi bahwa meskipun narasumber dalam wawancara menilai kondisi perekonomian masyarakat secara umum cukup baik, pada level rumah tangga nelayan masih terdapat kerentanan ekonomi yang perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan pengelolaan pesisir berbasis ICM, khususnya pada dimensi kesejahteraan sosial.

Data-data tersebut sekaligus menunjukkan bahwa struktur mata pencarian masyarakat Desa Sukajaya Lempasing bersifat multisektor, mencakup perikanan tangkap, pertanian, perdagangan/usaha kecil, dan jasa pariwisata pesisir, yang seluruhnya bergantung pada kondisi dan pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan. Kondisi ini memperkuat relevansi pendekatan ICM di Desa Sukajaya Lempasing, karena kebijakan pengelolaan pesisir

yang diambil akan berdampak langsung pada berbagai sektor mata pencaharian masyarakat sekaligus, bukan hanya pada satu kelompok profesi tertentu (Dahuri et al., 2001).

4.6 Dimensi Sosial-Ekonomi Masyarakat Pesisir

ICM juga menempatkan aspek sosial-ekonomi sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari pengelolaan wilayah pesisir, karena keberlanjutan lingkungan pada akhirnya harus selaras dengan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya pesisir (Dahuri et al., 2001). Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Sukajaya Lempasing bekerja sebagai nelayan dan mengandalkan hasil tangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di samping itu, terdapat pula kelompok masyarakat, khususnya kaum perempuan, yang menjalankan usaha kecil di sekitar kawasan pantai sebagai sumber pendapatan tambahan bagi keluarga. Peran perempuan pesisir dalam menopang ekonomi rumah tangga ini konsisten dengan temuan kajian pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat, yang menyebutkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya dan ekonomi rumah tangga pesisir meskipun sering kali kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan (Gai et al., 2020, dalam kajian pesisir berbasis masyarakat lokal).

Kondisi perekonomian masyarakat secara umum dinilai cukup baik dan masih mampu mendukung kebutuhan hidup sehari-hari. Stabilitas ekonomi ini tidak terlepas dari kondisi sumber daya perikanan yang masih relatif terjaga sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, sehingga terdapat keterkaitan yang erat antara kondisi ekologis dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Keterkaitan ini menegaskan relevansi pendekatan ICM yang memandang pengelolaan pesisir sebagai sistem yang saling memengaruhi antara aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial (Cicin-Sain & Knecht, 1998), sehingga kebijakan yang hanya berfokus pada satu aspek berisiko mengabaikan aspek lain yang sesungguhnya saling terkait.

4.7 Koordinasi Antarlembaga dan Tantangan Integrasi

Prinsip integrasi lintas sektor dan lintas kelembagaan merupakan inti dari pendekatan ICM. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa koordinasi pengelolaan kawasan pesisir di Desa Sukajaya Lempasing belum sepenuhnya berjalan optimal. Praktik pengelolaan pantai oleh pihak perorangan yang berkoordinasi langsung dengan dinas kabupaten tanpa melibatkan pemerintah desa secara intensif menunjukkan adanya fragmentasi koordinasi antara tingkat desa dan tingkat kabupaten. Kondisi ini sejalan dengan temuan kajian mengenai pembagian kewenangan pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia pascaberlakunya UU No. 23 Tahun 2014, yang menunjukkan bahwa perbedaan pengaturan kewenangan antartingkat pemerintahan dapat menimbulkan ketidakpastian dan tumpang tindih dalam praktik pengelolaan di lapangan (Ramadhan et al., 2026).

Selain itu, meskipun partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa sudah terjadi, belum ditemukan adanya forum koordinasi permanen yang secara khusus mempertemukan pemerintah desa, pengelola kawasan pesisir, kelompok nelayan, dan instansi kabupaten terkait secara berkala. Wijaya (2014) menekankan bahwa lemahnya koordinasi antarlembaga merupakan salah satu faktor utama yang mempercepat konflik dan degradasi sumber daya pesisir, sehingga diperlukan penguatan forum koordinasi lintas instansi serta penghilangan ego sektoral agar fungsi dan kewenangan masing-masing pihak berjalan selaras. Ketiadaan forum semacam ini di Desa Sukajaya Lempasing menjadi salah satu faktor yang menghambat terwujudnya integrasi horizontal (antar pemangku kepentingan pada tingkat yang

sama) dan integrasi vertikal (antar tingkat pemerintahan) secara simultan, yang keduanya merupakan syarat mendasar bagi keberhasilan implementasi ICM (Cicin-Sain & Knecht, 1998).

4.8 Sintesis dalam Kerangka Integrated Coastal Management

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir di Desa Sukajaya Lempasing telah memiliki sejumlah modal dasar yang sejalan dengan prinsip ICM, antara lain tersedianya regulasi tingkat desa yang terhubung dengan kebijakan kabupaten, adanya mekanisme pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, kondisi ekologis pesisir yang masih relatif terjaga, serta struktur sosial-ekonomi masyarakat yang cukup stabil karena bertumpu pada sektor perikanan dan usaha kecil masyarakat pesisir.

Di sisi lain, masih terdapat sejumlah kesenjangan yang perlu diperkuat agar pengelolaan pesisir dapat berjalan secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan, sejalan dengan empat dimensi keterpaduan ICM yang dikemukakan Cicin-Sain dan Knecht (1998), yaitu keterpaduan ekologis, sektor, disiplin ilmu, dan pemangku kepentingan. Pertama, diperlukan penyusunan regulasi desa yang lebih rinci dan komprehensif, tidak hanya mengatur sektor pariwisata, tetapi juga mencakup zonasi, mekanisme perizinan, dan standar konservasi kawasan pesisir. Kedua, perlu diperkuat mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih terlembaga dan berkelanjutan, tidak sebatas pada forum musyawarah insidental, sebagaimana disarankan dalam kajian partisipasi masyarakat pesisir berbasis kelembagaan lokal (Safrina, 2020). Ketiga, diperlukan penguatan sistem konservasi lingkungan yang lebih terprogram dan berbasis ekosistem (Berkes & Folke, 1998), mengingat kondisi ekosistem yang masih baik saat ini merupakan modal penting yang perlu dipertahankan melalui tindakan preventif. Keempat, dan yang paling mendasar dalam perspektif ICM, diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah desa, pengelola kawasan pesisir, dan instansi kabupaten, agar pengelolaan pesisir tidak berjalan secara terfragmentasi melainkan terintegrasi dalam satu kerangka tata kelola bersama.

Dengan memperkuat keempat aspek tersebut, pengelolaan wilayah pesisir di Desa Sukajaya Lempasing berpotensi berkembang dari model pengelolaan yang bersifat parsial dan berorientasi ekonomi jangka pendek, menuju model pengelolaan terpadu yang mengintegrasikan dimensi ekologis, sosial-ekonomi, dan kelembagaan secara seimbang, sebagaimana menjadi tujuan utama dari pendekatan Integrated Coastal Management (Cicin-Sain & Knecht, 1998; Dahuri et al., 2001).

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan tata kelola wilayah pesisir di Desa Sukajaya Lempasing telah memiliki sejumlah modal awal yang mendukung penerapan Integrated Coastal Management (ICM), antara lain keberadaan regulasi desa yang terkait dengan kawasan pesisir, mekanisme musyawarah dalam penyusunan kebijakan, kondisi ekologis yang relatif masih terjaga, serta struktur mata pencaharian masyarakat yang bersifat multisektor dan bergantung pada sumber daya pesisir. Temuan ini menjawab tujuan penelitian untuk mendeskripsikan kerangka kelembagaan dan menilai kondisi ekologis serta sosial-ekonomi masyarakat pesisir desa.

Pada saat yang sama, penelitian ini mengidentifikasi bahwa pengelolaan wilayah pesisir Desa Sukajaya Lempasing belum sepenuhnya terintegrasi sesuai dengan prinsip ICM. Regulasi yang ada belum komprehensif, partisipasi masyarakat belum terlembaga secara berkelanjutan,

program konservasi lingkungan belum terstruktur, dan koordinasi lintas sektor maupun lintas tingkat pemerintahan masih belum optimal. Kondisi tersebut menjawab tujuan penelitian terkait analisis partisipasi pemangku kepentingan dan koordinasi pengelolaan pesisir, serta menegaskan perlunya penguatan tata kelola untuk mencegah pengelolaan yang bersifat parsial.

Secara global, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir Desa Sukajaya Lempasing berada pada tahap awal penerapan pengelolaan terpadu: memiliki fondasi kelembagaan dan sosial-ekonomi yang penting, tetapi masih memerlukan penguatan di tingkat regulasi, partisipasi, konservasi, dan koordinasi agar mampu mewujudkan pengelolaan pesisir yang berkelanjutan. Sebagai rekomendasi, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten perlu mendorong penyusunan regulasi yang lebih rinci dan sinkron, membangun forum multipihak pesisir yang reguler, serta mengembangkan program konservasi berbasis ekosistem yang terencana, sementara penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara lebih mendalam efektivitas implementasi ICM di tingkat komunitas dan dampaknya terhadap ketahanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir.

6. Ucapan Terima Kasih

Para Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Sukajaya Lempasing, perangkat daerah terkait di Kabupaten Pesawaran, serta masyarakat, nelayan, dan pelaku usaha wisata yang telah berpartisipasi dalam proses pengumpulan data penelitian ini. Segala kekurangan yang terdapat dalam naskah ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab para penulis.

7. Kontribusi

Para penulisan naskah ini dilakukan oleh Azzahra Risqi Andania 2316041100 berperan dalam perumusan konsep penelitian, pengumpulan dan analisis data, serta penulisan bagian Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, serta Kesimpulan. Aldiva Mukhsin 2316041130, dan Muhammad Fauzi Mufti 2356041023 berkontribusi dalam pengembangan kerangka teori Integrated Coastal Management, penyusunan Tinjauan Pustaka, serta penelaahan kritis dan penyuntingan naskah. Kedua penulis bersama-sama membahas hasil, menyepakati struktur artikel, dan menyetujui versi akhir naskah untuk publikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, M., Mutaqin, B. W., & Marfai, M. A. (2025). Coastal management based on multi-hazard assessment in the very small islands of Karimunjawa, Indonesia. *Anthropocene Coasts*, 8, 5. <https://doi.org/10.1007/s44218-025-00069-x> (Springer Nature Link)
- Aptasari, F. W., Putri, B. K. M., Mujahidi, K., & Hastuti, E. W. (2024). Tantangan penerapan Social Return on Investment (SROI) di Indonesia: Studi kasus pada wilayah pesisir. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*.
- Aptasari, F. W., Putri, B. K. M., Mujahidi, K., & Hastuti, E. W. (2024). Tantangan penerapan Social Return on Investment (SROI) di Indonesia: Studi kasus pada wilayah pesisir. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*.

- Berkes, F., & Folke, C. (Eds.). (1998). Linking social and ecological systems: Management practices and social mechanisms for building resilience. Cambridge University Press.
- Berkes, F., & Folke, C. (Eds.). (1998). Linking social and ecological systems: Management practices and social mechanisms for building resilience. Cambridge University Press.
- Cicin-Sain, B., & Knecht, R. W. (1998). Integrated coastal and ocean management: Concepts and practices. Island Press.
- Cicin-Sain, B., & Knecht, R. W. (1998). Integrated coastal and ocean management: Concepts and practices. Island Press.
- Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S. P., & Sitepu, M. J. (2001). Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu. PT Pradnya Paramita.
- Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S. P., & Sitepu, M. J. (2001). Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu. PT Pradnya Paramita.
- Delly, D. P., Prasmatiwi, F. E., & Prayitno, R. T. (2020). Tingkat ketahanan pangan rumah tangga nelayan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis (JIJA)*, 7(2), 141–148. <https://doi.org/10.23960/jiia.v7i2.3373>
- Delly, D. P., Prasmatiwi, F. E., & Prayitno, R. T. (2020). Tingkat ketahanan pangan rumah tangga nelayan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis (JIJA)*, 7(2), 141–148. <https://doi.org/10.23960/jiia.v7i2.3373>
- Kay, R., & Alder, J. (1999). Coastal planning and management. E & FN Spon.
- Kay, R., & Alder, J. (1999). Coastal planning and management. E & FN Spon.
- Nugraha, A. (2024). Integrated coastal management in the current regional autonomy law regime in Indonesia: Context of community engagement. *Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs*, 16(4), 508–527. <https://doi.org/10.1080/18366503.2023.2283355> (Taylor & Francis Online)

- Nugraha, A. (2024). Integrated coastal management in the current regional autonomy law regime in Indonesia: Context of community engagement. *Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs*, 16(4), 508–527. <https://doi.org/10.1080/18366503.2023.2283355> (Taylor & Francis Online)
- Pemerintah Desa Sukajaya Lempasing. (2023). Profil dan data kependudukan Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Sistem Informasi Desa Sukajaya Lempasing. <https://sukajayalempasing.id/>
- Pemerintah Desa Sukajaya Lempasing. (2023). Profil dan data kependudukan Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Sistem Informasi Desa Sukajaya Lempasing. <https://sukajayalempasing.id/>
- Profil Desa Sukajaya Lempasing. (2021). Gambaran umum potensi dan mata pencaharian masyarakat Desa Sukajaya Lempasing.
- Profil Desa Sukajaya Lempasing. (2021). Gambaran umum potensi dan mata pencaharian masyarakat Desa Sukajaya Lempasing.
- Putra, M. G. A., Widiastuti, K. S., Pramono, Y., & Suhanda, D. (2025). Estimation of Sources and Marine Debris Dynamics Movement along the Coast of Sukajaya Lempasing Village, Lampung Province. *Journal of Marine and Coastal Science*, 14(3), 184–197. <https://doi.org/10.20473/jmcs.v14i3.75754> (E-Journal Universitas Airlangga)
- Putra, M. G. A., Widiastuti, K. S., Pramono, Y., & Suhanda, D. (2025). Estimation of Sources and Marine Debris Dynamics Movement along the Coast of Sukajaya Lempasing Village, Lampung Province. *Journal of Marine and Coastal Science*, 14(3), 184–197. <https://doi.org/10.20473/jmcs.v14i3.75754> (E-Journal Universitas Airlangga)
- Ramadhan, F., dkk. (2026). Tumpang tindih kewenangan pengelolaan wilayah pesisir pasca berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 dalam perspektif otonomi daerah. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*.
- Ramadhan, F., dkk. (2026). Tumpang tindih kewenangan pengelolaan wilayah pesisir pasca berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 dalam perspektif otonomi daerah. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*.

- Safrina, S. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir di Aceh. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(1), 30–49. <https://doi.org/10.38011/jhli.v2i1.19>
- Safrina, S. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir di Aceh. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(1), 30–49. <https://doi.org/10.38011/jhli.v2i1.19>
- Suhendrinal, S., Insani, M., Syah, N., Heldi, H., Catri, I., & Sholichin, M. (2024). Integrated Strategies for Sustainable Coastal Area Management: A Systematic Literature Review. *Science and Environmental Journal for Postgraduate*, 7(1), 74–82. <https://doi.org/10.24036/senjop.v7i1.259> (Senjop)
- Suhendrinal, S., Insani, M., Syah, N., Heldi, H., Catri, I., & Sholichin, M. (2024). Integrated Strategies for Sustainable Coastal Area Management: A Systematic Literature Review. *Science and Environmental Journal for Postgraduate*, 7(1), 74–82. <https://doi.org/10.24036/senjop.v7i1.259> (Senjop)
- Sulistiyadi, Y., et al. (2024). The Implementation of Integrated Coastal Management in the Development of Sustainability-Based Geotourism: A Case Study of Olele, Indonesia. *Sustainability*, 16(3), 1272. (MDPI)
- Sulistiyadi, Y., et al. (2024). The Implementation of Integrated Coastal Management in the Development of Sustainability-Based Geotourism: A Case Study of Olele, Indonesia. *Sustainability*, 16(3), 1272. (MDPI)
- Wibowo, T. A., Kaskoyo, H., & Damai, A. A. (2019). Pengembangan wisata Pantai Mutun terhadap dampak fisik, sosial dan ekonomi masyarakat Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran, Lampung. *Jurnal Pengembangan Kota*, 7(1), 83–90.
- Wibowo, T. A., Kaskoyo, H., & Damai, A. A. (2019). Pengembangan wisata Pantai Mutun terhadap dampak fisik, sosial dan ekonomi masyarakat Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran, Lampung. *Jurnal Pengembangan Kota*, 7(1), 83–90.
- Wijaya, A. (2014). Pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu dan berkelanjutan berbasis masyarakat. Diakses dari dipertasby.wordpress.com. Alwi, M.,

Mutaqin, B. W., & Marfai, M. A. (2025). Coastal management based on multi-hazard assessment in the very small islands of Karimunjawa, Indonesia. *Anthropocene Coasts*, 8, 5. <https://doi.org/10.1007/s44218-025-00069-x> (Springer Nature Link)

Wijaya, A. (2014). Pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu dan berkelanjutan berbasis masyarakat. Diakses dari dipertasby.wordpress.com.

Zamani, N. P., et al. (2024). Moving from an Integrated Coastal Management Approach to a Transdisciplinary Coastal Management Approach: A Review of Case Study in Indonesia. *BIO Web of Conferences*, 106, 02011. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202410602011> (ResearchGate)

Zamani, N. P., et al. (2024). Moving from an Integrated Coastal Management Approach to a Transdisciplinary Coastal Management Approach: A Review of Case Study in Indonesia. *BIO Web of Conferences*, 106, 02011. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202410602011> (ResearchGate)